

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Madjedi Hasan. 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. Fikahati Aneska. Jakarta.

A. Ubaedillah, Abdul Razak, 2012, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madanil, Kencana, Jakarta.

Abdul Razak, 2004. Analisis Hukum Tentang Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ammanagappa volume 12. Makassar : Universitas Hasanuddin

Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris. Kencana, Makassar.

Ahmad Sudiro. 2013. Hukum dan Keadilan, Aspek Nasional dan Internasional. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Aminuddin Ilmar. 2016. Hukum Tata Pemerintahan. Kencana. Jakarta

----- 2014. Membangun Negara Hukum Indonesia. Phinatama Media. Jakarta.

Dianto Bachriadi, Siene Indriani, dkk, 2016, Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilkada Serentak 2015, Komnas HAM RI. Jakarta



Abdullah, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta

Fritz Edwar Siregar, 2018, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada, Permata press, Surabaya.

Janedjri M. Gaffar, 2013, Politik Hukum Pemil. Konstitusi Press, Jakarta

John salindeho.1995.pengawasan melekat Aspek-Aspek Terkait dan implementasinya. Bumi Aksara:Jakarta,

Lawrence M Friedman, Law and Society an Introduction, 1977. Prentice Hall Inc, New Jersey.

Lia Wulandari, 2016, Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jurnal Pemilu dan Demokrasi.

M. Afifuddin, 2020, "Membumikan Pengawas Pemilu Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis", PT. Elex Media Komputindo: jakarta.

N. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,Liberty, Yogyakarta,

O. Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, et.al., (Ed.). 2001,Dimensi-dimensi PemilihanHukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

-----, 1987. Pokok-pokokHukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad Alwan Alwi,"Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan



Umum kepala Daerah Kabupaten Takalar" 2013 (Skripsi, sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

NurHidayat Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media Press, Yogyakarta.

Nomenson Sinamo, 2010. Hukum Administrasi Negara (suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara). Jala Permata Aksara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Ratna Dewi Pettalolo, 2019," Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Ahsanul Minan (Ed), serial evaluasi Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu", Bawaslu: Jakarta,

Ridwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Ruslan Husen, 2019 Dinamika Pengawasan Pemilu. Bandung: Ellunar, Jakarta.

Sadjijono, 2011. Bab-bab Pokok Hukum Administrasi. Lask Bang PRESSindo. Yogyakarta.

Salim HS dan Erles Septiani Nurbaini, 2017. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.



Soerjono Soekanto, 1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta,

Sudarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2018. Filsafat Pemilu. Nusa Media : Bandung.

Tim Redaksi BIP, 2017. Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2015, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945,Cetakan, Ketiga,Prenadamedia Group : Jakarta,

Tjahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose ; Jakarta.

W,J,S Poerwadarminta, 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.

Wahyu Saefudin, 2019. Mengembalikan Fungsi Keluarga. Ide Publishing. Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Abd Razak, Aminuddin Ilmar, Jurnal Amanna Gappa Vol 26 No 1 2018
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retrebusi
Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Kendari.

Andi Pangerang Moenta, Journal of Law, Policy and Globalization vol 50
2016, The Nature of General Election Supervisory Board
(Bawaslu) as the Guardian of the People's Sovereignty,

Bungasan Hutapea, 2015, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan
Hukum Nasional Volume 4, Nomor 1, Dinamika Hukum Pemilihan
Kepala Daerah di Indonesia,

Muh. Hasrul, Jurnal Living Law Vol 13 No 2, 2021 Efektifitas Hukum
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah
Terpilih Dari Jalur Perseorangan Di Kabupaten Gowa.

Kelik Pramudya, 2015, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum
Nasional Volume 4, Nomor 1, April 2015, Mewujudkan Sistem
Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan
Berkeadilan,



W Pariangu, Journal Publicuha vol 3 No 4, 2020 Netralitas
Aparatur Sipil Negara dan Birapotologi Dalam Pemilihan Kepala
Daerah.

Zulkifli Aspan, Abdul Razak, Marthen Arie, R.Muhammad Thamrin Payapo, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.66, 2017 “Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election”,

Zulkifli Aspan, Jurnal Unswagati Vol. 5 No 1, 2021 Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika.

Situs Web

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2035474-defenisi-pengawasan-menurut-para-ahli/>

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/definisi-pengawasan-dan-anggaran.html>,diakses pada 4 november 2022, pukul.01.52

<http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>,diakses padatanggal, 4 november 2022, pukul 02.13

<https://sulsel.suara.com/read/2020/11/10/051013/tidak-netral-di-pilkada-ide-pencabutan-hak-politik-asn-kembali-mengemuka.html>,diakses pada 8 nopember 2022, pukul 22.15

<https://www.tagar.id/14-asn-pemkot-makassar-langgar-netralitas-dua-dosen.html>,diakses pada 8 nopember 2022, pukul 22.15



LAMPIRAN

1. Surat Tugas PKD



SURAT TUGAS

NOMOR: /PM.00.02/SN-22.12/11/2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANGGALA

Merembang:

- Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin diatas, perlu melakukan Koordinasi Bersama Antar Pkd Dengan Stake Holder Kelurahan Bangkala Terkait Menghadapi Tahapan Kampanye.

Dasar:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PM.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2022, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas pemilu ad Hoc;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-1 15.01.2.419886/2023, Tanggal 23 Desember 2022;

MENGUASKAN

Kepada : Faisal Azis Manuruki

Untuk :

- Dinas dalam rangka melakukan "Koordinasi Bersama Antar Pkd Dengan Stake Holder Kelurahan Bangkala Terkait Menghadapi Tahapan Kampanye" pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 pukul 15.30-18.00 WITA, bertempat di Sekretariat PPS Kelurahan Bangkala.
- Menyampaikan hasil pengutusan ini kepada pejabat yang terkait.
- Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal: 16 November 2023

Kepala Sekretariat

Adhitya Zulhairnain Masdar, S.STP
Nip : 199404282017061001



2. Surat Tugas Panwascam

 BAWASLU Badan Pengawas Pemilihan Umum KECAMATAN MANGGALA	
No. 14/14/2023/BAWASLU/PM/00.03/K.5H/22.12/08/2023 Email : badanpengawas@kemendagri.go.id	
SURAT TUGAS	
NOMOR: /P.M.00.03/K.5H/22.12/08/2023	
KETUA	
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANGGALA	
Menerangkan:	<ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin diatas, perlu melakukan Monitoring/Evaluasi terkait Posko Daftar Pemilih Tambahan (DPTt).
Dasar:	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;c. Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PM/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2022, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;f. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0319/TK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas pemilih ad Hoc;g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-1 15.01.2.419668/2023, Tanggal 23 Desember 2022;
MENUGASKAN	
Kepada :	Abubakar Murtajon S.Ag Iham Syukur Muhammad Ikhwan Rahman S.H
Untuk :	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas dalam rangka "Monitoring/Evaluasi terkait Posko Daftar Pemilih Tambahan (DPTt)" pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 pukul 14.30 WITA sampai selesai, bertempat di Sekretariat PPS Bangkaja.2. Menyampaikan hasil pertugasan ini kepada pejabat yang terkait.3. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditandatangani di Makassar Pada Tanggal: 13 Agustus 2023	
KETUA,	
Abubakar Murtajon, S.Ag	

